

**IMPLEMENTASI SISTEM SMART PLANNING  
BUDGETING DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN  
KEUANGAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Panriandik Jiwa Kosah Hehanussa  
NPP 31.0341

*Asdaf Kota Jakarta Timur  
Provinsi DKI Jakarta  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: panriandik27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Arina Romarina, SE, M.Ec. Dev

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *(The community demands reform and implementation of efficient, effective and transparent government administration in managing regional finances, so the Provincial Government of DKI Jakarta makes program updates related to online budget preparation, namely Smart Planning Budgeting. Purpose: This study aims to determine the implementation of the Smart Planning Budgeting system in preparing the DKI Jakarta Province regional financial budget, the constraints related to the implementation of Smart Planning Budgeting in the DKI Jakarta Province, as well as the DKI Jakarta Provincial Government's efforts to overcome obstacles to the implementation of Smart Planning Budgeting in preparing the Provincial regional financial budget. DKI Jakarta. Method This research was conducted using a qualitative descriptive research method using an inductive approach. Data/information collection was carried out using interview techniques as the main instrument, then supplemented with documentation. Data analysis techniques used by researchers are data reduction, data presentation, conclusion drawing, data display, and verification. Result: The results of this study indicate that the implementation of the Smart Planning Budgeting system at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province has been going well, this can be proven in helping the process of budget activities from planning, budgeting, to budget control to be faster and accountable. Conclusion: The results of this study indicate that the implementation of the Smart Planning Budgeting system in preparing budgets in the regional government of DKI Jakarta Province has been going quite well in helping the budget activity process achieve its goals, namely realizing effectiveness, efficiency, accountability and transparency of the regional financial management process. In its implementation there were several obstacles including the Smart Planning Budgeting program or software which was quite difficult to operate, the Smart Planning Budgeting website was difficult to access, and inadequate human resources, and the unavailability of the Smart Planning Budgeting operating module. While the efforts made to overcome this are*

*coordinating with related agencies, conducting consultations with Smart Planning Budgeting consultants, and utilizing existing Human Resources.*

**Keywords:** *Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat menuntut melakukan pembaharuan serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif serta transparan dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat pembaharuan program berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bersifat *online* yaitu *Smart Planning Budgeting*.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, faktor kendala terkait implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta, serta upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala implementasi *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

**Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, *display* data, serta verifikasi.

**Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dalam membantu proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan akuntabilitas.

**Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan cukup baik dalam membantu proses aktivitas anggaran mencapai sasaran yaitu mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi proses pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu program atau perangkat lunak *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, *website Smart Planning Budgeting* sulit diakses, serta Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dan belum tersedianya modul pengoperasian *Smart Planning Budgeting*. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan konsultan *Smart Planning Budgeting*, serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

**kata kunci:** Implementasi, Sistem, Smart Planning Budgeting

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan komunikasi dan teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan terjadinya transformasi kehidupan masyarakat menuju era elektronik baru. Segala inovasi dirancang untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat (R.D. Nasution, 2017). Memberikan banyak kemudahan dan cara baru dalam melakukan aktivitas manusia (Ngafifi, 2014). Semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk menerima informasi dengan cepat dan baik. Masyarakat menuntut melakukan pembaharuan serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif serta transparan dalam mengelola keuangan daerah (Darmawan et al., 2020). Sehingga masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses informasi yang relevan, jelas, akurat dan lengkap serta dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana pemerintah memanfaatkan birokrasi pada untuk kebutuhan dan kesejahteraannya dapat dengan mudah mengaksesnya melalui teknologi.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 menghasilkan perubahan yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penyerahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur atau mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai potensi yang ada di daerahnya namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berlandaskan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, hal ini dapat diharapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pada pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi (*Electronic budgeting*) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sistem ini bertujuan agar dapat memenuhi persyaratan pemerintah sebagai *Good Governance* yaitu, pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada warga Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sistem pengelolaan keuangan daerahnya yang berbasis teknologi yaitu *Electronic Budgeting* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Atau Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui *Electronic Budgeting*.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dijelaskan bahwasannya keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala untuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Electronic Government ataupun yang lebih dikenal dengan e-Government adalah suatu cara pemanfaatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan komunikasi antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah. E-Government diprakarsai oleh pemerintah dalam bentuk yang sederhana, yaitu menyediakan berbagai informasi dan data komputer tentang penggunaan dan pengembangan pemerintah sebagai transparansi dalam pelayanan publik. Dari sudut pandang pemerintahan, e-Government juga dapat digunakan untuk komunikasi baik antar SKPD maupun masyarakat. Dengan adanya e-Government, pemerintah juga memberikan tambahan inovasi-inovasi dalam penganggaran yang dapat mempermudah kerja instansi pemerintah, seperti e-budgeting. Penganggaran elektronik adalah suatu pendekatan dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penganggaran. Dengan menggunakan metode ini, proses penganggaran menjadi lebih efisien karena dilakukan secara online dan dapat diakses dengan mudah.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu, Ditemukannya kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat UPS yang bermula dari pembahasan anggaran DPRD yang dinilai lain, lalu dalam Penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) menjadi sorotan di RAPBD DKI tahun 2020. Penyebabnya adalah sejumlah usulan anggaran yang dinilai janggal seperti pengadaan lem aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp123,9 miliar, penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar. Penyusunan APBD tahun 2021 juga mengalami kejanggalan yang tidak masuk akal, seperti kegiatan DPRD DKI Jakarta, sub koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986. Adanya anggaran yang dinilai tidak teratur pada penyusunan APBD tahun 2021, yang diduga karena sistem *e-budgeting* tidak mampu menolak secara otomatis anggaran yang dinilai tidak teratur.

Selain itu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan *Electronic budgeting* adalah sumber daya manusia yang kurang memahami dalam pengoperasian sistem *Electronic budgeting* sangatlah terbatas, sehingga hanya beberapa orang saja yang mengerjakan proses penginputan data secara *electronic* sehingga memperlambat proses penyusunan anggaran. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan *upgrade* program aplikasi berbasis data *online* tersebut untuk memudahkan efektivitas pemerintah dalam penyusunan anggaran yang sebelumnya merupakan *Electronic budgeting* menjadi *Smart Planning Budgeting*.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pelaksanaan partisipasi maupun implementasi serta system smart planning budgeting. Penelitian Pertama Ade Firli Julianty berjudul *Analisis Implementasi E-Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta* (Ade Firli Julianty, 2020), menemukan bahwa terwujudnya transparansi dan akuntabilitas *e-budgeting* dari upaya pemerintah mempublikasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan program pemerintah kota Surakarta. Penelitian Atik Andhayani berjudul *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Atik Andhayani, 2020) membuktikan bahwa pelaksanaan *e-budgeting* telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak. Penelitian (Anggi Pratama Nasution & Atika 2019) berjudul *Implementasi E – Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai* menemukan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi, karena pelaksanaan anggaran di Pemkot Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun dan belum optimal. Penelitian (Reviona Juliar & Neneng Dahtiah, 2020) berjudul *Implementasi Kebijakan dan Sistem Pengendalian Manajemen E-Budgeting dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)* menemukan bahwa keberhasilan kebijakan implementasi *e-Budgeting* dan sistem pengendalian manajemennya akuntabilitas dalam penyusunan APBD lebih akuntabel dan lebih terukur, serta efektivitas APBD yang dilaksanakan tepat waktu dan berhasil melakukan efisiensi dalam anggaran. Berdasarkan hasil penelitian (Khoirunnisak, Arishanti, & Vebrianti, 2018) yang berjudul *Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance* menemukan Peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem, kualitas sumber daya manusia dan inovasi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni teori Laudon dan Laudon 2005

### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi system smart planning budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengetahui factor penghambat, dan untuk mengetahui Upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi hambatan

Implementasi system smart planning budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan daerah

## II METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive* sampling terdiri atas Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sub Bidang Anggaran, dan Penyelia Bidang Anggaran. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Hardani dkk (2020:161) mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020) yakni, reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan.

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi system *smart planning budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

### 3.1. Implementasi Sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penulis menggunakan teori system informasi manajemen Laudon dan Laudon 2005: (99-141)

1. Organisasi
  - a. Standar penerapan system smart planning budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
  - b. Culture budaya dalam penyusunan anggaran keuangan daerah dalam budaya transparansi menempatkan pentingnya mengungkapkan informasi secara terbuka pada public baik pihak eksternal atau internal.
  - c. Struktur organisasi disini di desain untuk mendukung proses penyusunan anggaran keuangan daerah dengan efektif.
2. Manajemen
  - a. Tersedianya informasi dalam perencanaan penyusunan anggaran dengan memperoleh system smart planning budgeting yang dki Jakarta

- punya dapat memperoleh informasi tentang anggaran dan beberapa platform lainnya sebagai bentuk tersedianya informasi.
- b. Manajemen informasi perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah dalam manajemen informasi terutama melalui penggunaan system informasi yang terintegrasi yang memungkinkan akses data real time.
3. Teknologi
    - a. Proses perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah di provinsi DKI Jakarta dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan tahapan-tahapan yang jelas dan sudah melibatkan berbagai pihak instansi pemerintah.
    - b. Jaringan dalam pelaksanaan system smart planning budgeting Kerjasama antar unit dan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan sangat penting dan memiliki mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang kuat.
    - c. Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti hardware dan software dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi sudah sangat efektif dan efisien.
  4. Keahlian
    - a. Kemahiran dalam penggunaan system smart planning budgeting untuk perencanaan penganggaran keuangan daerah dalam mengelola dan menjalankan aplikasi harus sudah memahami mendalam tentang aplikasi ini dari bagaimana data dan informasi mengalir didalamnya.
    - b. Kemampuan teknisi dalam menjalankan system smart planning budgeting yang Dimana kemampuan sumberdaya manusia harus memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi ini karena di dalam aplikasi ini sangat banyak platform yang harus diintegrasikan.
    - c. Sumber daya manusia yang paham dan mengerti serta bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran keuangan daerah harus mengerti dan paham karena memang sangat diperhatikan karena itu merupakan bentuk tanggungjawab pegawai.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sebelas (11) indikator dalam implementasi system smart planning budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di badan pengelolaan keuangan daerah provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

No.	Indikator	Keterangan
1.	Standar penerapan indikator smart planning budgeting dalam perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah	Optimal
2.	Culture(budaya) dalam penyusunan anggaran keuangan daerah	Optimal

3.	Struktur organisasi pembagian penempatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi pengambil Keputusan.	Optimal
4.	Dengan tersedianya informasi dalam perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah untuk pengambilan Keputusan	Optimal
5.	Manajemen informasi perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah.	Optimal
6.	Proses perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah	Optimal
7.	Jaringan dalam pelaksanaan indicator smart planning budgeting	Optimal
8.	Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti hardware dan software.	Belum Optimal
9.	Kemahiran dalam penggunaan indicator smart planning budgeting untuk perencanaan penyusunan anggaran keuangan daerah	Optimal
10.	Kemampuan teknis dalam menjalankan indicator smart planning budgeting.	Optimal
11.	Sumber daya manusia yang paham dan mengerti serta bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran keuangan daerah.	Optimal

### 3.2. Faktor kendala terkait Implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta

- a. Program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan

Dalam mengoperasikan sistem SPB ini dapat dilihat dari langkah-langkah maupun panduan yang harus dikerjakan terlalu banyak dan sulit dan terkadang membuat bingung sehingga harus teliti dalam memahami aplikasi SPB tersebut, menyebabkan pegawai membutuhkan waktu yang ekstra dalam proses penyusunan dan penganggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran tersebut. Pada saat waktu pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan secara bersama-sama, situs atau *website Smart Planning Budgeting* pada jam tertentu terutama pada jam kerja yaitu pukul 08.00 sampai 16.00 sulit diakses dan bahkan tidak bisa diakses, hal ini disebabkan karena pada jam tersebut banyaknya SKPD yang sedang mengakses situs ini. Sehingga hal ini menjadi penghambat dalam proses penyusunan anggaran melalui sistem tersebut.

- b. Belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran

Selama proses pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* operator dalam bekerja belum dilengkapi dengan buku pedoman petunjuk (modul) mengenai pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan sistem tersebut mempersulit pekerjaan operator di dalam penginputan data maupun verifikasi data, dikarenakan format tentang penginputan anggaran yang seringkali berubah-ubah dan waktu yang dibutuhkan dalam penginputan data menjadi lebih lama karena operator harus belajar secara otodidak, tidak jarang juga operator dari beberapa SKPD harus pergi ke provinsi untuk berkonsultasi dengan BPKD mengenai teknis penginputan anggaran melalui *Smart Planning Budgeting*, hal ini tentu akan menghambat proses penyusunan anggaran yakni efisiensi waktu.

c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*

Kurangnya pelatihan dari BPKD terkait pelaksanaan penginputan komponen anggaran menggunakan sistem *Smart Planning Budgeting* kepada pegawai/staf menyebabkan keterlambatan target kerja yang harus dicapai. Sumber daya manusia di BPKD bagian anggaran terkait pelaksanaan di lapangan tingkat konsistensi terkait pengusulan maupun penginputan kode rekening maupun pagu anggaran terdapat beberapa SKPD yang mengalami hambatan, sehingga terdapat revisi sumber daya yang tersedia membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra untuk memberikan sosialisasi yang lebih kepada SKPD terkait hambatan tersebut. Hal itu merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan budaya kerja bagi pegawai yang baik sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

### **3.3. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* dalam Penyusunan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

a. Upaya mengatasi program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan

Adapun dalam mengatasi hambatan terkait pengoperasiannya, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi horizontal terkait dengan teknis pengoperasian *Smart Planning Budgeting* terutama yang berkaitan dengan *software Smart Planning Budgeting*. Dengan cara berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait terutama dengan tenaga ahli dalam penataan dan pengembangan sistem informasi yang berpengalaman di bidang informasi teknologi dengan konsultasi maupun pelatihan dengan mengikutsertakan pegawai yang berhubungan langsung dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan daerah serta menandatangani langsung ke BPKD Provinsi DKI Jakarta untuk melaporkan data anggaran SKPD tersebut atau bisa berkonsultasi mengenai proses penginputan komponen jika terjadi kendala pada penyelia masing-masing SKPD yang sudah ditunjuk.

b. Upaya mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran Upaya untuk mengatasi masalah belum tersedianya petunjuk teknis (modul), hal yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terkait dengan *Smart Planning*

*Budgeting* serta berkoordinasi dengan instansi horizontal guna memecahkan masalah terkait dengan pengoperasian *Smart Planning Budgeting*. Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui BPKD juga terus melakukan evaluasi dengan pelatihan ataupun sosialisasi dan koordinasi kepada pengguna *Smart Planning Budgeting* yaitu pegawai BPKD maupun SKPD terkait.

c. Upaya mengatasi Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting* Pengelolaan program *Smart Planning Budgeting* diperlukan Sumber Daya Manusia yang cukup memiliki keahlian dibidang komputerisasi dan keuangan. sehingga upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menciptakan budaya kerja yang baik antar pegawai dengan saling *men-support* dan mendukung satu sama lain, menciptakan budaya kerja yang baik, memberikan penghargaan, kemudian terus memberikan imbauan maupun peringatan terhadap pegawai maupun SKPD terkait yang masih memiliki kekurangan terkait dengan konsistensi dan ketelitian.

#### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sistem *Smart Planning Budgeting* dibangun untuk mengakomodir proses perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem *Smart Planning Budgeting* juga merupakan penyempurnaan sistem ebudgeting yang telah digunakan sebelumnya. Tujuannya yakni untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan sehingga dapat terciptanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sistem. Penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian oleh Ade Firli Julianty (2020) bahwa penerapan *e-budgeting* dalam mendukung transparansi di kota Surakarta sudah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, serta sama dengan hasil penelitian Reviona Juliar & Neneng Dahtiah, (2020) menunjukkan keberhasilan kebijakan *implementasi eBudgeting* di kota Bandung yang sudah efektif dan efisien dalam sistem informasi anggaran. Hasil dari penelitian lainnya mengenai sumber daya yaitu Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, dan Dien Dadeka Vebrianti (2018) menunjukkan Peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem, kualitas sumber daya manusia dan inovasi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran. Dalam penelitian itu tingkat pelaksanaan dipersempit dengan beberapa faktor yakni kepemimpinan, komunikasi, sumber daya, motivasi, keberhasilan, dan proses perumusan yang secara keseluruhan terbelang sebelumnya sudah efektif namun belum secara maksimal Dalam pelaksanaannya Sistem *Smart Planning Budgeting* yang dijalankan oleh Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dan memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berkurangnya manipulasi anggaran yang dilakukan oknum pegawai serta berkurangnya tingkat korupsi yang terjadi. Dalam pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting* terdapat faktor kendala yang terjadi. Program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, Belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran, Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai

dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*. Dalam hal sumber daya sama dengan hasil penelitian Atik Andhayani (2020) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, memerlukan dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak. Penelitian Nasution dan Atika (2019) yang mana ketidakmaksimalan dari implementasi *electronic budgeting* berdasar dari keberhasilan yang masih belum tercapai karena pemerintah Kota Binjai sendiri baru setahun menerapkan program ini dibanding DKI Jakarta sebagaimana ditambah pula dengan keadaan DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Harapannya dengan adanya sistem *Smart Planning Budgeting* terutama di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat terjaga akuntabilitas public, menekan risiko korupsi, dokumentasi data yang lebih efektif serta mempermudah evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting* mencakup seluruh komponen kegiatan anggaran mulai dari tahap penyusunan dan tahap penganggaran sampai berakhirnya tahun anggaran yang telah terintegrasi dan tersimpan dengan baik sehingga hal tersebut membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran yaitu mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran keuangan daerah. Faktor kendala terkait Implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta Program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran, dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* dalam Penyusunan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal ataupun membuat jadwal untuk akses kedalam sistem *Smart Planning Budgeting*, menandatangani langsung ke BPKD Provinsi DKI berkonsultasi mengenai proses penginputan komponen jika terjadi kendala. Berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terkait dengan *Smart Planning Budgeting* serta berkoordinasi dengan instansi horizontal guna memecahkan masalah terkait dengan pengoperasian *Smart Planning Budgeting*. Melakukan evaluasi dengan melakukan pelatihan maupun sosialisasi dan koordinasi kepada pengguna *Smart Planning Budgeting*. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menciptakan budaya kerja yang baik antar pegawai dengan saling mendukung satu sama lain, memberikan penghargaan, kemudian terus memberikan imbauan maupun peringatan terhadap pegawai maupun SKPD terkait yang masih memiliki kekurangan terkait dengan konsistensi dan ketelitian.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan pada fokus dan lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Sistem

Informasi Manajemen Laudon dan Laudon 2005 (99-141)

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan sukses.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>

Anggi Pratama N., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisandpublik/article/view/454>

Darmawan, N., Ridwan, L. M., Putra, S. H., Saputra, S., Jamaludin, Surya, N. E., & Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi* (T. Limbong (ed.)). Yayasan Kita Menulis. [kitamenulis.id](http://kitamenulis.id)

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (H. Abadi (ed.); Cetakan I). CV.Pustaka Ilmu.

Julianty, A. (2020). Analisis Implementasi E Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 149-162.

Juliar, R., & Dahtiah, N. (2020). Implementasi Kebijakan dan Sistem Pengendalian Manajemen E- Budgeting dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 162–172.

Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. (2018). Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance. *UNEJ EPROCEEDING*

Laudon. K dan Laudon. J. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta:Salemba Empat.

Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 30–42.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

Tjilen, A. P. (2020). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi*. Nusa Media.

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 pasal 1 tentang

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah/Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting

<https://apbd.jakarta.go.id/home> <https://bpkd.jakarta.go.id/>

